

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Arsana, I Putu Jati, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Cet. I., Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2016
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bina Aksara, Jakarta, 2003
- , *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cet. I, Alumni, Bandung, 2006
- , *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet. I, Rajawali Pers, 2016
- Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy*. USA: Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, N.J.,1992, Hal. 8
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Hadjon, Phillipus M *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008

- , *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. IX, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Liberty, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014
- Pramono, Hariadi, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta 2010
- Ramli, Samsul, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, VisiMedia, Jakarta, 2014
- Simamora, Yohanes Sogar, *Hukum Kontrak-Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia Edisi Kedua*, Kantor Hukum “WINS & Partners Law Firm” bekerjasama dengan Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, Maret, 2013
- , *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Pressindo, 2017
- Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah: Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005
- Sutedi, Adrian., *Aspek Hukum Pengadaan Barang&Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009
- Widjaja, H.A.W., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Yanto, Nur., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta. 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); dan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bn

JURNAL

- Assaori, M. Sofian, “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 9, Desember 2015
- Murdian, “Tanggung Jawab Pidana Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal IUS*, Vol. IV., No.1., April 2018
- Musa, Ishak, “Peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Sumber Dana APBD Terkait Dengan Audit Pengadaan barang/Jasa”, *Linkar Widya Swara*, Vol. 4, No. 4, Okt - Des 2017
- Pane, Musa Darwin, “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, *Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, Desember 2017
- Sufriadi, “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol.1. No.1., Juni 2014
- Susanti, Ita, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya”, *Sigma-Mu*, Vol. 10, No. 2, September 2018

INTERNET

- Admin Riau Pos, “Dua Oknum ASN Divonis 3 dan 4 Tahun Penjara”, <https://m.riaupos.co/205214-berita-dua-oknum-asn-divonis-3-dan-4-tahun-penjara.html>, Jumat 2 Agustus 2019, Dikunjungi pada 9 Oktober 2019
- Bagian Pengadaan Barang/Jasa, “Inilah Keempat Tipe Swakelola yang Memberi Ruang Lebih Baik untuk Dunia PBJ”, www.bulelengkab.go.id, 2 Juli 2019, dikunjungi pada 13 November 2019

Inspektorat Daerah KP, “Tugas APIP dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa”,
www.inspektorat.kulonprogokab.go.id, 22 September 2018, diakses pada 6 Januari
2020

Fadiyah, Syifa, “Kenali Apa Itu E-Procurement dan Manfaatnya untuk bisnis
Anda”, Februari 2019, www.hashmicro.com, Diakses pada tanggal 20
November 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 4
November 2019, Pukul 12.35 WIB

Ramli, Samsul, “Distribusi Kewenangan PA, KPA, dan PPK (Bagian 3) PPK,
PPTK, dan Pejabat Penandatanganan kontrak”,
[https://samsulramli.net/2019/01/02/distribusi-kewenangan-pa-kpa-dan-ppk-
bagian3/](https://samsulramli.net/2019/01/02/distribusi-kewenangan-pa-kpa-dan-ppk-bagian3/), 2 Januari 2019, dikunjungi pada tanggal 18 November 2019

-----, “FAQ : PPTK dan Gambar Teknis Konstruksi”,
<https://samsulramli.net/2019/01/09/faq-pptk-dan-gambar-teknis-konstruksi/>, 9
Januari 2019, dikunjungi pada 18 November 2019

-----, “Menggugat Kriminalisasi Jabatan PPTK”, www.samsulramli.net, Juni
2019, dikunjungi pada 16 Juli 2019

Redaksi Lensa, “RB Oknum PPTK di Bolsel Masuk Bui, Ini Alasannya”,
<https://lensa.news/hukrim/rb-oknum-pptk-di-bolsel-masuk-bui/>, tanggal
akses 18 November 2019

Sopian, Abu, “Antara PPK, PPTK, dan PPK-SKPD”, www.bppk.kemenkeu.go.id,
diunduh pada tanggal 28 Juni 2019

Tim Website BPB/J Kota Samarinda, “Tipe Swakelola”,
www.bpbj.samarindakota.go.id, dikunjungi pada 26 November 2019

www.report-lpse.lkpp.go.id, diakses pada tanggal 19 November 2019

DISERTASI

Chandra, Agus, *Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019

Djatmiati, Tatiek Sri, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004

SKRIPSI

Anjani, Ajeng Kartika, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019

Noviana, *Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019

Harahap, Dian Padena, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014

LAIN-LAIN

Alamsyah, Wana, Lais A., dan Agus S., “Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018”, Indonesia Corruption Watch, 25 Februari 2018

Sabela, Gayo, “Tahapan Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Seminar Nasional Pengadaan Secara Elektronik Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UNIKOM, Rabu, 8 Maret